

PERAN PERPUSTAKAAN DIGITAL DALAM MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN DIGITAL UNIVERSITAS LAMPUNG)

Atin Istiarni

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: atinistiarni@gmail.com

Endah Kurniasari

Universitas Lampung

Email: endah.kurniasari@staff.unila.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah masyarakat era informasi memaknai ruang publik digital dan bagaimanakah peran perpustakaan digital Universitas Lampung dalam menciptakan ruang publik virtual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berpijak pada teori kritis tentang ruang publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas dan Henry Lefebvre. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis data meliputi tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa ruang publik dalam masyarakat informasi dimaknai sebagai ruang di mana terjadi proses interaksi tanpa batas. Peran perpustakaan digital Universitas Lampung dalam menciptakan ruang publik antara lain (1) Memberikan kebebasan akses sistem maupun konten, (2) memberikan kebebasan berekspresi pada pengguna melalui fasilitas komunikasi antar pengguna maupun pengelola (3) Memberikan kesetaraan bagi siapapun untuk mengakses dan menfaatkan aplikasi perpustakaan digital Universitas Lampung (4) memiliki payung hukum dalam pengelolaan perpustakaan digital (5) memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan perpustakaan digital Universitas Lampung menjadi ruang publik ideal.

Kata kunci: Perpustakaan Digital, Ruang Publik, Masyarakat Informasi.

Abstract

The purpose of this study is to find out how the information age community understands digital public space and how the role of the University of Lampung's digital library in creating virtual public spaces. This research uses descriptive qualitative research methods. This research builds on the critical theory of public space proposed by Jurgen Habermas and Henry Lefebvre. Data collection through literature study and interviews. Data analysis includes three stages namely data reduction, data presentation, and conclusion or verification. Based on the results of the study, it was found that the public space in the information society is interpreted as a space where there is an infinite process of interaction. The role of the University of Lampung's digital library in creating public spaces includes (1) Providing freedom of

access to systems and content, (2) giving freedom of expression to users through communication facilities between users and managers (3) Providing equality for anyone to access and utilize digital library applications The University of Lampung (4) has a legal umbrella in managing digital libraries (5) has a shared commitment to turn the University of Lampung's digital library into an ideal public space.

Keywords: Digital Library, Public Spaces, Information Society.

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan dan keinginan untuk berinteraksi dengan entitas lain. Interaksi yang dilakukan terjadi secara dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Selain interaksi, setiap orang membutuhkan eksistensi untuk diakui keberadaannya (eksis) dalam sebuah komunitas masyarakat. Ruang (*space*) merupakan unit eksistensial yang memungkinkan keduanya dapat terjadi.

Wacana tentang ruang tidak terlepas dari ideologi pihak yang terlibat di dalamnya (Setiawan, 2017, p.1). Ini karena ruang merupakan sebuah produk sosial masyarakat yang memiliki kepentingan dan karakter dari aktor penciptanya. Tak ayal lagi, jika ruang telah menjadi sebuah representasi ideologi dalam masyarakat. Ruang merupakan titik fokus pendapat utama bagi lahirnya masyarakat yang bebas dan terbuka, tidak dibatasi tekanan eksternal dan merupakan bentuk ruang publik yang paling sederhana (Habermas, 1991, p.2).

Jurgen Habermas merupakan pemikir kritis bermadzhab marxis yang pertama kali menghembuskan konsep ruang publik. Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam karya-karyanya sangat berkaitan dengan pengalaman hidup yang dialaminya, termasuk buah pikirannya tentang konsep ruang publik yang cukup signifikan dan dikenal dengan teori *Public Sphere* (Hendrawan, 2015, p.2). Ia merupakan filsuf era *posmodern* yang banyak mengkritisi perubahan sosial budaya masyarakat. Pemikiran Habermas mengenai ruang publik terpilah menjadi dua, yaitu konsep ruang publik borjuis dalam bukunya berjudul *The Structural Transformation of Public Sphere* dan konsep ruang publik dalam kerangka demokrasi

deliberatif yang muncul dalam teks *Between Facts and Norms* (Prasetyo dalam Wicandra, 2013, p.1).

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah “ruang baru” yang bersifat artifisial dan maya, yaitu *cyberspace* (Piliang, 2012, p.144). Kehadiran *cyberspace* telah meruntuhkan pemahaman bahwa konsep ruang haruslah dalam bentuk riil. Ruang *cyber* tidak menuntut keberadaan secara fisik aktor ataupun entitas yang terlibat. *Cyberspace* yang terbentuk oleh jaringan komputer dan informasi yang terhubung secara global telah menawarkan bentuk-bentuk “komunitas” sendiri (*virtual community*), bentuk “realitas” nya sendiri (*virtual reality*) dan bentuk “ruang” nya sendiri (*cyberspace*) (Piliang, 2012, p.144). Pergeseran perilaku sosial masyarakat terjadi dalam melakukan interaksi dari ruang riil ke dalam ruang *cyber*. Diskusi, mencari informasi, bertengkar, bersenda gurau, berbincang dan interaksi lainnya dapat dilakukan di ruang *cyber*. Segala aktivitas yang selama ini terjadi dalam ruang riil, hampir semua dapat dilakukan dalam ruang *cyber*. Dengan demikian, majunya teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan munculnya ruang-ruang publik dalam dimensi baru yaitu dunia maya (Hendrawan, 2015, p.1). Fenomena tersebut sejalan dengan pendapat Lebvre tentang konsep ruang yang menurutnya merupakan ruang sosial, ruang selalu terkait dengan sebuah gejala sosial (Setiawan, 2017, p.3).

Kemunculan ruang publik baru tersebut bisa dilihat dari semakin riuhnya perbincangan di sosial media serta beragamnya aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk berinteraksi. Adanya internet dan keadaan masyarakat yang sudah bergantung pada teknologi semakin membuktikan bahwa *cyberspace* merupakan ruang publik baru masyarakat informasi. Data pengguna internet tentu menjadi fakta yang patut untuk dilihat tentang pergeseran cara berinteraksi masyarakat. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, setidaknya begitu menurut laporan terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet dan Indonesia. Mayoritas pengguna internet

sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban (<https://bit.ly/2LpzJrR>). Tak heran, jika pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia di sepanjang tahun 2017 naik menjadi 54,68 persen.

Rhenald Kasali (2017, p.21) menjabarkan setidaknya ada lima ciri-ciri peradaban baru (*new era*). Pertama, teknologi mengubah manusia dari peradaban *time series* menjadi *real time*. Data hari ini, pada detik ini juga langsung terolah dalam *big data* dan secepat itu pula bisa disimpulkan dan ditindaklanjuti. Kedua, *Sharing Economy* (ekonomi berbagi, akses). Era baru ditandai dengan sikap terbuka untuk memanfaatkan sumber daya. Ketiga, *On demand economy* (begitu diinginkan, saat itu juga tersedia). Saat konsumen menghendaki, pemilik barang harus berada di dekat mereka dengan produk atau layanan. Jarak sudah mati; stok digital, data, dan armada sudah dipindahkan ke dekat konsumen. Teknologi dan algoritma *big data* memungkinkan semuanya terjadi. Keempat, *supply-demand* dengan jejaring. Sebuah perusahaan dibangun oleh puluhan bahkan ribuan orang yang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya. Saat ini, masyarakat hidup dalam dunia *apps* yang pada saat bersamaan dikerjakan oleh puluhan, bahkan ribuan jejaring yang mempercepat *disruption*. Kelima, Lawan-lawannya tak terlihat. Kemajuan teknologi sangat memungkinkan produsen langsung bisa masuk ke konsumen tanpa perantara lagi dan tanpa identitas hingga tak terlihat oleh orang lain.

Seiring dengan penetrasi internet dari dunia bisnis yang begitu gencar, dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi juga berlomba-lomba untuk *go online*, dari fasilitas *research archive* di perpustakaan hingga fasilitas *wireless zone* sudah tidak asing lagi di dunia kampus saat ini (Simarmata, 2014, p.27). Perkembangan lain dalam dunia perpustakaan saat ini adalah *trend* pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan layanan daring dalam bentuk layanan Perpustakaan Digital. Perpustakaan Digital dihadirkan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi perpustakaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. International Federation and Library Association (IFLA) mendeskripsikan bahwa perpustakaan digital

adalah koleksi *online* dalam bentuk digital dengan kualitas yang terjamin yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara internasional untuk pengembangan koleksi dan dapat diakses dengan cara yang koheren dan berkelanjutan dengan didukung oleh layanan yang diperlukan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan (Fitriani, 2017, p.3). Perpustakaan digital hadir sebagai upaya perpustakaan dalam mendekatkan diri kepada konsumennya yang telah berevolusi menjadi masyarakat informasi di era baru dalam ruang *cyber*.

Ruang-ruang *cyber* semakin banyak dan hampir tak ada perbedaan dengan ruang riil. Semakin eksisnya *cyberspace* semakin terbentang persoalan fenomenologis tentang “ada” dan “keberadaan” di dalamnya. Apakah keberadaan ruang virtual sama dengan kehidupan nyata dalam ruang realitas (Nufus, 2017, p.29). Apakah publik baru (*cyberspace*) mampu menghilangkan hegemoni dan kekuasaan dari kalangan borjuis?. Berbagai fenomena tentang ruang publik di atas menjadi hal menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang bagaimanakah masyarakat informasi memaknai ruang publik? Dan, sejauh mana peran perpustakaan digital Universitas Lampung dapat menciptakan ruang publik dalam media baru?

B. LANDASAN TEORI

1. Ruang Publik dalam Media Baru

Teori tentang ruang telah banyak dimunculkan oleh beberapa pemikir kritis Era Posmodern, seperti Michel Foucault, John Gaventa, Henri Lefebvre, dan Jurgen Habermas. Foucault memandang ruang sebatas praktik kekuasaan. Pandangan serupa dikemukakan John Gaveta yang melihat ruang sebagai medium bagi warga dalam memengaruhi keputusan politik maupun kebijakan. Dalam kontestasi penyebutan ruang, Lefebvre dan Habermas memandang bahwa ruang merupakan produk sosial yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, ruang bersifat dinamis.

Term “*public sphere*” atau ruang publik telah dikenalkan Jurgen Habermas pada tahun 1989. Ruang publik pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu (*private people*) dalam konteks sebagai kalangan borjuis yang diciptakan seolah-olah sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik (Nasrullah, 2012, p.35). Habermas memandang publik sebagai spesifikasi masyarakat sipil yang mengukuhkan diri sebagai tempat pertukaran komoditas dan kerja sosial yang diatur oleh kaidah-kaidahnya sendiri (Hendrawan, 2015, p.2). Latar belakang Habermas yang kuat dipengaruhi oleh masa-masa kepemimpinan NAZI. Ia menyadari makna betapa penting arti demokrasi, khususnya kebebasan berpendapat melalui ekspresi gagasan yang bebas dari tekanan politik dan dominasi kapital (Lubis dalam Hendrawan, 2015, p.2).

Habermas dalam *Between Facts and Norms* menempatkan ruang publik sebagai ruang yang plural. Setiap komunitas dan kelompok masyarakat dapat membentuk ruang publiknya sendiri. Pemikiran ini sebagai reaksi atas kritik kaum posmodernisme yang melihat pemikiran ruang publik pertama (borjuis) sebagai ruang yang cenderung eksklusif (Wicandra, 2013, p.2). Sementara, Lefebvre dalam *The Production of Space* (1991) memberikan perspektif lain dalam memahami ruang dibandingkan dengan para pemikir sebelumnya. Ia menyajikan konsep baru ruang sebagai ruang sosial. Lefebvre berpendapat bahwa ruang tidak hanya dimaknai sebagai ruang fisik maupun ruang abstrak saja. Lefebvre melihat ruang senantiasa tercipta secara dinamis, yang menyesuaikan dirinya dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini yang mendasari kritik Lefebvre dengan menyajikan konsep baru ruang, sebagai ruang sosial (Setiawan, 2018, p.3).

Konsep ruang ala Lefebvre tersebut relevan dengan perkembangan sosial masyarakat saat ini. Perubahan tersebut tak lain karena hadirnya teknologi dan internet yang memunculkan ruang publik baru bernama ruang siber (*cyberspace*). Ruang siber menjadi media baru sebagai ruang publik. Flew (dalam Simarmata, 2014, p.25) mendefinisikan media baru adalah semua bentuk media yang

menggabungkan tiga unsur C, yaitu: *computing and information technology*(IT), *communication network*, dan *convergence (digitalized media and information content)*. Media baru yang dapat juga disebut digital media, memiliki ciri-ciri di mana informasi menjadi mudah dimanipulasi, berjejaring, padat, mudah diperkecil, dan seolah tidak punya pemilik. Dengan sifatnya yang virtual, interaktif, konvergen, dan global, maka internet hadir sebagai ruang publik yang lebih luas. Media baru membentuk ruang publik berskala internasional (Simamarta, 2014, p.26).

Menurut Habermas, ruang publik ideal akan terbentuk apabila di dalamnya ada kemudahan akses, kebebasan berekspresi, kesetaraan, serta kepastian hukum. Hal ini juga berlaku dalam media baru. Variabel-variabel tersebut akan diuraikan sebagai berikut (Zubaidi, 2011, p.147):

a. Kemudahan Akses

John E. Newhagen dan Erick P. Bucy dalam Media Access menggambarkan dua dimensi akses terhadap media, yaitu *Technological access* dan *Content access*. *Technological access* lebih banyak mengarah pada perangkat keras dan dukungan infrastruktur, yang kemudian terbagi dalam *physical access* dan *system access*. Sedangkan *content access* yang akan membahas rinci mengenai motivasi akses dan kemampuan dalam mengakses teknologi komunikasi. Sama halnya dengan *technological access*, *content access* pun terbagi menjadi dua bagian, *social* dan *cognitive access*. Berikut adalah bagan dimensi akses terhadap teknologi komunikasi.

1) Akses Teknis: Fisik dan Sistem

Dimensi akses pertama adalah akses teknis, yang meliputi fisik dan sistem. Akses fisik mengharuskan pengguna media baru bersentuhan langsung dengan perangkat teknologi yang digunakan untuk dapat mengakses informasi yang terdapat dalam media baru tersebut. Komputer, telepon dan media elektronik adalah bagian dari perangkat fisik yang harus terpenuhi. Harga perangkat teknologi yang semakin

mudah, secara tidak langsung memicu masyarakat untuk mengakses informasi melalui berbagai media teknologi yang ada. Perangkat teknologi tidak lagi eksklusif dan hanya dimiliki kelompok tertentu, sehingga semua golongan dan lapisan masyarakat dimungkinkan untuk memiliki akses yang sama terhadap informasi. Selanjutnya yang kedua adalah akses sistem. Akses sistem adalah variabel yang menghubungkan perangkat fisik yang satu dengan yang lain, seperti *bandwidth* internet, web kaskus, dan jaringan komputer. Dengan demikian, kualitas akses sangat ditentukan oleh kekuatan jaringan yang menghubungkan titik yang satu dengan yang lain.

2) Akses Konten: Sosial dan Kognitif

Titik berat akses konten adalah motivasi pengguna teknologi informasi dalam mengakses informasi, dan bagaimana kemampuan pengguna dalam menterjemahkan setiap informasi yang didapat agar bernilai positif. Pada beberapa bahasan teknologi komunikasi dan masyarakat, akses teknologi sangat kental dengan faktor demografi penggunanya. Bahkan, klaim bahwa akses teknologi hanya dimiliki oleh masyarakat perkotaan, menengah atas, berkulit bersih, serta berpendidikan tinggi, masih banyak berkembang. Padahal, akulturasi budaya dan perkembangan teknologi memberikan perubahan terhadap akses media. *Technological Literacy* atau wawasan bagaimana teknologi komunikasi dimanfaatkan dengan tepat, menjadi penentu akses media. Wawasan pengguna teknologi dapat dibangun melalui lingkungan, masyarakat, dan budaya. Masyarakat yang terbuka dengan inovasi-inovasi baru, dan budaya kerja yang serba cepat, secara tidak langsung memacu pengguna untuk selalu bersentuhan dengan media. Mereka akan belajar bagaimana media dapat dimanfaatkan dengan baik.

Variabel kedua dari akses konten adalah, kognitif akses. Kognitif akses menggambarkan pendekatan psikologi terhadap perilaku pengguna teknologi komunikasi. Faktor psikologis pengguna teknologi mempengaruhi bagaimana pengguna menterjemahkan setiap pesan yang terkandung dalam media. Karena pesan yang dikemas dengan berbagai bentuk, dan disalurkan melalui media komunikasi dapat diinterpretasikan beragam oleh penggunannya, termasuk gambar, suara, bahkan komposisi warna. Dengan kemudahan yang ada pada akses teknis, termasuk harga perangkat yang murah, biaya koneksi internet yang terjangkau, kecepatan koneksi internet yang cukup, akan membantu terbentuknya ruang publik bagi masyarakat. Demikian juga pada akses konten. Pemahaman masyarakat yang tepat akan penggunaan media baru diharapkan dapat benar-benar mengembangkan kaskus sebagai ruang publik ideal.

b. Kebebasan Berekspresi

Aspek kebebasan berkespresi menjadi hal penting dalam mewujudkan ruang publik ideal. Ruang publik menjamin setiap orang untuk mengaksesnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Namun demikian, kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak tanpa aturan. Aturan yang dibentuk guna menjamin setiap orang yang menggunakan ruang publik tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak mengganggu kepentingan orang lain maupun melewati batas sehingga dapat memicu konflik antar pengguna ruang.

c. Kesenjangan

Aspek kesetaraan dalam ruang publik akan meminimalisir terjadinya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Dalam ruang publik ideal, faktor gender, jabatan, tingkat pendidikan dan lain sebagainya diabaikan. Semua

orang setara dan berhak untuk menggunakan ruang publik tersebut. Ruang-ruang publik “baru” yakni ruang publik maya sangat memungkinkan semua itu terjadi. Misalnya saja media sosial, setiap orang diberikan akses yang setara dalam membuat dan mengelola akunnya. Fasilitas yang ada di dalam media sosial tersebut dapat diakses oleh setiap pemilik akun. Menu-menu yang terdapat dalam akun instagram seorang Rektor, sama dengan menu-menu yang terdapat dalam akun instagram mahasiswanya.

d. Kepastian Hukum

Guna memastikan setiap pengguna ruang publik memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka diperlukan adanya seperangkat hukum untuk mengaturnya. Hukum yang diberlakukan juga digunakan sebagai alat untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap orang untuk berekspresi di ruang publik, selain itu juga digunakan sebagai acuan dalam memberikan sanksi pada tindakan pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, setiap pengguna ruang publik memiliki kepastian hukum yang jelas dan legal. Terlebih ruang publik dalam media baru seperti saat ini. Seperangkat hukum untuk mengatur aktivitas publik dalam media baru telah dikeluarkan seperti hukum mayanatra dalam bentuk UU ITE dan KUHP.

e. Komitmen

Komitmen bersama untuk mempertahankan eksistensi ruang publik sangat penting. Proses membentuk sebuah ruang publik menjadi ruang yang ideal merupakan proses panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya, komitmen bersama dalam proses mewujudkan ruang publik ideal dapat mempertahankan eksistensi ruang publik tersebut. Setiap orang memiliki peran masing-masing yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang publik ideal.

2. Masyarakat Informasi

Seperti diketahui bahwa saat ini telah terjadi lompatan luar biasa pada perubahan sosial di masyarakat. Perkembangan teknologi telah menjadi sebab hadirnya era baru masyarakat. Teknologi informasi dan internet telah menciptakan ruang baru, komunitas baru, dan masyarakat baru yang menghuni ruang bernama *cyber*. *Cyberspace* merupakan dunia, tempat orang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan ruang riil. Kehadiran teknologi dan munculnya ruang *cyber* membawa harapan sekaligus kekhawatiran. Teknologi yang seharusnya menjadi alternatif saat ini telah bertransformasi menjadi duplikasi dari kehidupan riil. Telah terjadi pengaburan batas antara kehidupan riil dan maya. Padahal, Pilliang menyebutkan bahwa *cyberspace* merupakan sebuah dunia simulasi yang bertentangan dengan representasi. Dunia “simulasi” dalam konteks *cyberspace*, adalah sebuah dunia yang di dalamannya setiap “ada” (beings) diubah wujudnya menjadi “ada citra” (*being images*); setiap ontologi diubah menjadi “ontologi citraan” (*ontology of image*); setiap realitas dibuatkan substitusi-substitusinya berupa “citra realitas” (*image of reality*); setiap wujud fisik ditransformasikan ke dalam wujud halusinasi (Pilliang, 2012, p.149).

Teknologi informasi dan internet telah mengubah gaya hidup masyarakat dari *time series* menjadi *real time*. Kebutuhan masyarakat harus dipenuhi saat itu juga. Gaya hidup *real time* sudah memasuki kondisi “normal” yang merupakan sebuah kewajaran yang dialami setiap orang. Setiap hari mereka akrab dengan teknologi informasi. Segala aspek kehidupan masyarakat, berupa pekerjaan, hiburan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, telah bergantung pada teknologi informasi. Dapat dikatakan bahwa media baru memunculkan adanya masyarakat era baru yakni masyarakat informasi.

Masyarakat era baru yang juga disebut masyarakat informasi merupakan sebuah konsep yang membahas berbagai perubahan sosial dan ekonomi dengan perkembangan teknologi (Fitriani, 2017, p.4). Masyarakat informasi yang ditandai

adanya perilaku informasi merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berhubungan dengan sumber dan saluran informasi. Perilaku pencarian informasi merupakan upaya menemukan informasi sebagai akibat adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Perilaku mencari informasi juga berupa apa yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi, sedangkan perilaku penggunaan informasi, yaitu perilaku yang dilakukan seseorang ketika menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah dimiliki sebelumnya (Hendrawan, 2015, p.4).

Perubahan gaya hidup masyarakat turut berpengaruh pada perkembangan layanan perpustakaan. Sebagai lembaga yang menyediakan informasi, kebutuhan masyarakat informasi harus diakomodir dan disediakan oleh pengelola perpustakaan. Layanan perpustakaan digital hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi secara *real time*. Hal tersebut sesuai dengan misi utama perpustakaan digital, yaitu mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi sehingga mampu menciptakan suatu layanan terpadu, terkoordinasi, dan terdokumentasi serta tersebar informasi ke masyarakat secara cepat, tepat, dan bermanfaat. Dengan demikian, hadirnya perpustakaan digital dapat relevan dengan kondisi masyarakat era baru.

3. Perpustakaan Digital

Istilah perpustakaan digital sampai saat ini belum memiliki pengertian yang baku. Namun, pada dasarnya kata "*digital*" yang menempel pada kata "perpustakaan" mendeklarasikan adanya format baru layanan perpustakaan yang berbasis digital. Konsep perpustakaan mencakup empat hal utama, yaitu: koleksi, pelayanan, organisasi, dan sistem (Fitriani, 2017, p.5). Teknologi memiliki peran besar dalam terwujudnya layanan perpustakaan digital. Perpustakaan digital bukan semata-mata pemakaian perangkat komputer, melainkan sebuah upaya secara luas untuk menjawab kebutuhan dan persoalan di bidang informasi umumnya, dan bidang perpustakaan khususnya (Pendit, 2008, p.2).

Meskipun perpustakaan digital merupakan konsep baru layanan perpustakaan, prinsip-prinsip perpustakaan konvensional tetap tidak bisa dihilangkan. Hal ini diperkuat dari definisi *Digital Library Federation*, yang berbunyi:

“Digital libraries are organizations that provide the resources, including the specialized staff, to select, structure, offer intellectual access to, interpret, distribute, preserve the integrity of, and ensure the persistence over time of collections of digital works so that they are readily and economically available for use by a defined community or set of communities” (<https://archive.ifla.org/VI/5/op/udtop8/udt-op8.pdf>).

Guna memudahkan konstruksi konsep perpustakaan digital, maka diasumsikan bahwa perpustakaan digital memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan perpustakaan konvensional. Pengembangan koleksi dan manajemen, analisis subjek, pembuatan indeks, penyediaan akses, pekerjaan referensi, dan Pelestarian merupakan fenomena teknis-manajerial dalam tata kelola perpustakaan yang akan dibingkai secara konseptual. Namun, fokus sempit pada format digital sendiri telah menyembunyikan pekerjaan di belakang layar yang dilakukan perpustakaan untuk mengembangkan dan mengatur koleksi dalam rangka membantu pengguna menemukan informasi (Cleveland, 1998, p.2). Melalui perpustakaan digital, pekerjaan pustakawan semakin diperluas melalui teknologi baru, format baru, dan media baru.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan secara rinci dan apa adanya tentang suatu fenomena tertentu dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Penelitian kualitatif dilakukan dengan berlandaskan pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dan lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2010, p.14). Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sukmadinata (2008, p.26), pendekatan deskriptif berarti mendeskripsikan suatu fenomena atau keadaan

dengan apa adanya, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan.

Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai konsep ruang publik dalam *era cyber* dalam konsep perpustakaan digital. Penelitian ini difokuskan pada pengalaman masyarakat informasi dalam memaknai “ruang publik” yang direpresentasikan dalam perpustakaan digital di tengah perkembangan teknologi informasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan kondisi masyarakat informasi dalam memanfaatkan perkembangan teknologi berupa perpustakaan digital sebagai sarana ruang publik.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan studi pustaka. Sementara, pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau informan penelitian didasarkan atas tujuan tertentu (Sugiyono, 2011, p.85). Dalam melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara, peneliti menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada informan yang memenuhi kriteria: 1). Mahasiswa Aktif, 2) Sedang menempuh studi di Universitas Lampung baik jenjang D3, S1,S2 maupun S3, 3) informan merupakan orang yang hampir selalu menggunakan menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan informasi akademik, dan 4) informan merupakan orang yang cakap menggunakan perpustakaan digital dan selalu mengaksesnya.

Pada penelitian ini, informan yang didapatkan berjumlah 3 (tiga orang). Ketiga informan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh jenjang S1 di Universitas Lampung. Dapat dikatakan ketiganya merupakan generasi milenial dan sering mengakses internet untuk mencari informasi. Selain itu, peneliti juga menambahkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pengelola perpustakaan digital Universitas Lampung. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh

Miles dan Haberman yang meliputi tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang ruang publik selalu menarik untuk dicermati perkembangannya. Dalam era kemajuan teknologi seperti saat ini, muncul pertanyaan apakah konsep ruang publik yang dikemukakan Habermas masih relevan? Namun, perlu dipertimbangkan juga pernyataan Lafebvre bahwa ruang itu selalu diproduksi menyesuaikan perubahan sosial masyarakat.

Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi telah mengubah gaya hidup masyarakat. Teknologi informasi telah menciptakan masyarakat informasi di mana informasi menjadi kebutuhan utama dalam penyelesaian berbagai masalah. Masyarakat telah memasuki era baru yang kebutuhannya harus terpenuhi secara *real time*, bukan lagi *time series*. Komunitas-komunitas virtual juga banyak terbentuk dalam sebuah jaringan global melalui internet. Ruang-ruang publik mutlak atau riil bukan lagi tempat satu-satunya, namun ada ruang publik alternatif yaitu ruang *cyber*. Masyarakat saat ini cenderung menggunakan ruang *cyber* untuk melakukan aktualialisasi diri, bahkan mendapatkan eksistensi yang tidak didapatkan dalam ruang publik riil.

Perpustakaan yang fungsinya sebagai *agent of change* tentu telah siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan akses informasi. Hadirnya perpustakaan digital bisa dilihat sebagai upaya perpustakaan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat informasi yang *real time* dan tak terbatas. Data perpustakaan digital di Indonesia yang tergabung dalam Indonesia One Search (IOS) saat ini sebanyak 945 institusi, 1151 perpustakaan, dan 4983 repositori (www.onesearch.id).

1. Ruang Publik dalam Perspektif Masyarakat Informasi

Kehadiran ruang *cyber* merupakan sebuah fenomena yang menggambarkan munculnya era baru di mana ruang tidak lagi dipandang sebatas pada bangunan,

teritorial, maupun kekuasaan. Pilliang (2012, p.147) menjelaskan bahwa *Cyberspace* adalah dunia antara, yaitu dunia bit-bit informasi yang mampu menciptakan berbagai hubungan dan relasi sosial yang bersifat virtual. Oleh karena hubungan, relasi dan interaksi sosial di dalam *cyberspace* bukanlah antar-fisik di dalam sebuah wilayah atau teritorial tertentu, maka ia menciptakan semacam deterritorialisasi sosial (*social deterritorialisation*), yaitu interaksi sosial yang tidak dilakukan di dalam sebuah teritorial yang nyata (dalam pengertian konvensional) akan tetapi di dalam sebuah halusinasi teritorial (*territorial hallucination*).

Ruang siber atau *cyberspace* pada dasarnya menyediakan apa yang disebut Jones (dalam Nasrullah, 2012, p.38) sebagai *new public space*. Ruang *cyber* telah memberikan ruang bagi pengguna untuk menemukan cara baru dalam berinteraksi dalam berbagai hal. Relasi dan interaksi di ruang *cyber* telah membentuk sebuah jaringan dan komunitas di ruang *cyber* yang terhubung melalui jaringan internet. Keberadaan internet membangun komunikasi nonformal, saluran komunikasi yang terhubung secara horizontal antar-entitas, dan bahkan menjadi alternatif dalam memperoleh informasi, selain media tradisional (Nasrullah, 2012, p.12).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, menurut informan 1 mengatakan bahwa ruang publik di era internet harus dikembangkan karena ruang publik memiliki fungsi sebagai sistem yg menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui internet, semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi yang tersebar di dalamnya melalui berbagai platform yang diinginkan dan masyarakat dapat memilih secara bebas informasi apa yang diinginkan, dengan syarat telah memiliki piranti yang mendukung untuk mengakses internet minimal *gadget* dan saluran internet.

Sedangkan menurut informan 2 mengatakan bahwa ruang publik menjadi salah satu tempat yang positif untuk berkumpul dengan tujuan yang sama, *sharing* permasalahan baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Baik itu di dunia nyata maupun dunia maya yang menjadi ruang bagi masyarakat atau komunitas.

Di sisi lain, perlu dilihat pula bahwa hadirnya teknologi informasi dan internet merupakan sebuah produk kapitalis yang tentu saja akan menghadirkan hegemoni dan power di dalamnya. Lefebvre memandang ruang dalam dunia kapitalis saat ini telah mengalami “sublimasi” sehingga teralineasi menjadi sesuatu yang abstrak (Setiawan, 2017, p.4). Ruang abstrak yang dimaksud oleh Lefebvre adalah ide, gagasan, dan karya dari pemilik modal yang tidak terlihat secara fisik. Ide dan gagasan yang terkadang tidak mewakili seluruh kebutuhan bagi tiap lapisan masyarakat. Hanya golongan tertentu saja yang dapat mengakses ruang tersebut. Hal itu kemudian diperparah dengan kekuasaan rezim hak milik sehingga mendegradasi eksistensi ruang publik yang bebas dari kekuasaan para borjuis. Habermas menyebutnya sebagai *domain of common concern* yakni penguasaan beberapa domain oleh otoritas tertentu. Karya-karya yang dibagikan di internet bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa diakses, melainkan sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan.

Seperti halnya yang dialami oleh ketiga informan yang aktif berselancar di dunia maya. Berdasarkan informasi yang didapat dari ketiganya mengatakan bahwa terdapat pembatasan akses pada konten perpustakaan digital, terutama dalam hal ‘mengunduh’ koleksi perpustakaan digital. Pilliang (2012, p.155) mengatakan bahwa meskipun secara prinsipil, *cyberspace* adalah sebuah ruang terbuka yang bersifat egalitarian, seperti sebuah “agora” atau ruang publik (*public space*) di dalam budaya politik Yunani, yang di dalamnya setiap orang mempunyai hak, kesempatan, dan akses yang sama terhadap dunia kehidupan di dalamnya akan tetapi, pada kenyatannya “egalitarianisme” itu tidak terbentuk, sebab tetap saja ada elit yang mendominasi komunikasi di dalam *cyberspace*. Eksklusivitas tetap saja terbentuk di dalam *cyberspace*, terutama disebabkan akses yang terbatas untuk orang-orang tertentu, di samping *cyberspace* memerlukan tingkat kompetensi tertentu untuk dapat memasukinya.

Melalui pendekatan kultural, ruang publik internet atau *cyberspace* melahirkan budaya baru dalam proses demokratisasi. Tidak ada lagi batasan antara borjuis dan proletar, batasan gender menjadi kabur, dan siapa saja bisa melibatkan dirinya dalam debat intelektual yang terjadi di ruang virtual. Bahwa terjadi pembatasan-pembatasan tertentu dalam hal akses informasi menjadi sebuah bukti bahwa kontrol kekuasaan masih berlaku meskipun dalam ranah *cyber*.

2. Peran Perpustakaan Digital Universitas Lampung dalam Menciptakan Ruang Publik

Perpustakaan dalam padangan ruang riil telah berhasil menjadi ruang publik yang netral dan bebas dari dominasi penguasaan terhadap informasi. Kesuksesan tersebut akhirnya coba diterapkan dalam layanan perpustakaan digital. Perpustakaan digital dihadirkan untuk memberikan solusi akses tak terbatas dan bebas dari penguasaan informasi dan dominasi kapitalisme modern.

a. Kebebasan Akses

Salah satu variabel penting yang akan membentuk ruang publik menjadi ruang publik yang ideal adalah kebebasan akses. Telah dijelaskan bahwa ruang publik muncul untuk membedakan dengan ruang privat. Perpustakaan Digital merupakan salah satu aplikasi yang muncul sebagai solusi atas keterbatasan layanan akses koleksi pada perpustakaan konvensional. Melalui perpustakaan digital, masyarakat dapat mengakses informasi di dalamnya kapanpun tanpa dibatasi waktu.

Kebebasan akses meliputi dua hal yakni akses teknis dan akses konten. Dalam kebebasan akses teknis, perpustakaan digital Universitas Lampung memberikan kebebasan kepada siapapun untuk mendapatkan aplikasi perpustakaan digitalnya karena telah tersedia di *playstore* dan *Appstore*. Tidak ada pembatasan gender atau klaster-klaster yang diperbolehkan untuk mengakses aplikasi perpustakaan digital milik Universitas Lampung.

Sedangkan dalam hal akses konten, yang menjadi poin penting adalah kemampuan dan keterampilan pengguna perpustakaan digital dalam mencari, menemukan, memanfaatkan, dan mengelola informasi yang didapatkan agar bernilai positif atau dalam hal *digital literacy* sangat diandalkan. Masyarakat informasi yang akrab dengan internet dan dunia digital belum tentu memiliki kemampuan literasi digital yang baik sehingga masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat mengakses konten digital seperti perpustakaan digital. Dalam hal ini, peran pustakawan atau pengelola perpustakaan digital Universitas Lampung dalam memberikan pelatihan literasi digital sangat membantu sivitas akademika dalam memahami akses konten perpustakaan digital. Pemahaman yang tepat dan benar akan membuat perpustakaan digital Universitas Lampung menjadi ruang publik dalam media baru yang ideal.

b. Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari adanya ruang publi, baik ruang publik konvensional maupun ruang publik baru. Kebebasan berekspresi dalam ruang publik virtual diakomodir dalam bentuk tersedianya fasilitas interaksi antar pengguna aplikasi. Berdasarkan informasi dari pengelola perpustakaan digital Universitas Lampung, aspek kebebasan berekspresi yang disediakan untuk pengguna adanya fasilitas interaksi dengan pengelola.

Kebebasan ekspresi tentu saja bukan kebebasan tanpa aturan. Aturan yang diterapkan guna mengatur dinamika dan keteraturan komunitas pengguna perpustakaan digital. Demikian pula yang diterapkan oleh pengelola perpustakaan digital Universitas Lampung. Menurut informan 4, aturan yang diterapkan oleh pengelola perpustakaan digital berkaitan dengan akses konten digital yang biasanya memiliki hak cipta. Konten-konten dalam perpustakaan digital berupa buku, jurnal, prosiding dan hasil penelitian mahasiswa tentu memiliki hak cipta yang sepenuhnya bukanlah dimiliki oleh pengelola

perpustakaan digital. Guna melindungi hak cipta, maka terdapat beberapa aturan yang harus ditaati oleh pengguna perpustakaan digital.

c. Kesetaraan

Sebagai sebuah aplikasi berbasis digital dan terhubung dengan internet, maka konsekuensinya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menggunakannya. Demikian pula perpustakaan digital Universitas Lampung yang memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk mengakses konten di dalam perpustakaan digital Universitas Lampung tanpa memandang latar belakang maupun status sosialnya. Berdasarkan informasi dari pengelola, perpustakaan digital Universitas Lampung dapat diakses oleh masyarakat umum selain sivitas akademika Universitas Lampung.

d. Kepastian Hukum

Meskipun telah menghilangkan sekat teritorial dan memunculkan informasi global, ada beberapa hal tertentu yang perlu dilindungi, terutama *privacy* pengguna juga hak cipta. Media sosial populer seperti Facebook, Instagram, twitter, dan youtube dengan jelas mencantumkan aturan-aturan penggunaan aplikasi dan setiap pengguna mendapatkan kepastian hukum yang sama.

Demikian juga yang diterapkan oleh pengelola perpustakaan digital Universitas Lampung. Terdapat aturan dan payung hukum yang dijadikan pedoman dalam mengelola perpustakaan digital. Namun, sepertinya payung hukum tersebut baru dapat diakses oleh pengelola, sedangkan berdasarkan ketiga informan, ketiganya tidak mengetahui payung hukum yang ada di perpustakaan digital Universitas Lampung.

e. Komitmen

Dunia digital yang semakin dinamis membuat pengelola perpustakaan digital diharuskan berinovasi untuk mewujudkan perpustakaan digital Universitas Lampung menjadi salah satu alternatif ruang publik digital

Komitmen dari pengguna maupun pengelola sangat dibutuhkan dalam mewujudkan perpustakaan digital Universitas Lampung menjadi salah satu ruang publik dalam media baru yang ideal.

E. PENUTUP

Ruang publik menjadi tanda bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lain. Melalui ruang publik, masyarakat dapat menyalurkan ide dan mendapatkan informasi serta melakukan diskusi tanpa ada hegemoni dan tekanan kekuasaan. Ruang yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama dan tidak memandang kelas sosial masyarakat merupakan konsep ruang publik yang dikeluarkan oleh Habermas. Tekanan dan hegemoni dari penguasa tidak berlaku di ruang publik.

Ruang publik dalam *era cyber* telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial budaya masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Lefebvre yang menyatakan bahwa ruang publik merupakan produk sosial, ia senantiasa berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Perubahan juga terjadi layanan perpustakaan. Kehadiran layanan perpustakaan digital merupakan inovasi layanan perpustakaan untuk memberikan akses tak terbatas ruang dan waktu bagi masyarakat luas. Kehadiran internet memudahkan layanan perpustakaan digital dapat menjangkau seluruh wilayah yang memiliki akses.

Perpustakaan digital Universitas Lampung merupakan salah satu ruang publik dalam media baru berbasis digital. Meskipun belum dapat dikatakan ideal berdasarkan variabel-variabel yang dikemukakan oleh Habermas. Dibutuhkan komitmen pengguna maupun pengelola perpustakaan digital Universitas Lampung untuk mengembangkan perpustakaan digital tersebut agar menjadi ruang publik ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohang, F. K. (2018, February 22). Berapa jumlah pengguna internet indonesia? *Kompas.com*. <https://bit.ly/2LpzJrR>
- Cleveland, G. (1998). Digital libraries: Definitions, issues and challenges. IFLA. <https://archive.ifla.org/VI/5/op/udtop8/udt-op8.pdf>
- Fitriani, D. N. (2017, November 7). *Peran perpustakaan digital dalam meningkatkan eksistensi perempuan (Studi dengan perspektif feminis pada mahasiswa Universitas Indonesia)*. Konferensi Perpustakaan Digital 10, Mataram.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere*. First MIT Press. <https://bit.ly/2xdN40>
- Hadi, A. (2005). *Matinya dunia cyber space: Kritik humanis mark slouka terhadap jagat maya*. LKiS.
- Hendrawan, M. R. (2015, August 18). *Peran perpustakaan umum dalam membangun masyarakat informasi : sebuah telaah ruang publik jürgen habermas*. SEMILOKA KEPUSTAKAWANAN INDONESIA "LibraryMove On: Bangga Menjadi Profesional di Dunia Perpustakaan dan Informasi."
- Kasali, R. (2017). *Disruption*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lefebvre, H. (1992). *The production of space*. Wiley-Blackwell.
- Nasrullah, R. (2012). Internet dan ruang publik virtual, sebuah refleksi atas teori ruang publik habermas. *Jurnal Komunikator* , 4(1). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/188>
- Nufus, A. (2012). Eksistensi perpustakaan dalam ruang virtual pada abad XXI. *LIBRIA*, 9(1). <https://s.id/mm1xC>
- Pendit, P. L. (2008) . *Perpustakaan digital, dari a sampai z*. Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri
- Pilliang, Y. A. (2012). Masyarakat informasi dan digital: Teknologi informasi dan perubahan sosial. *Jurnal Sositologi*, 11(27), 143-155. <https://s.id/mm4Mp>
- Setiawan, A. (2017). Produksi ruang sosial sebagai konsep pengembangan ruang perkotaan (kajian atas teori ruang henry lefebvre). *Haluan Sastra Budaya*, 33(11). <https://s.id/mm6SG>

Zubaidi, A. N. (2011). Ruang publik dalam media baru (www. kaskus. us). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 139-158. <https://s.id/mm8A8>